



## Spiral Of Silence di Era Digital: Ketakutan Berpendapat di Media Sosial Dalam Konteks Kebebasan Berekspresi di Indonesia

Aliyah Jasmine Rifa Riyanti<sup>1</sup>, Muhammad Danda Mulia<sup>2</sup>, Arini<sup>3</sup>, Vieronica Varbi Sununianti<sup>4</sup>, Istiqomah<sup>5</sup>, Deni Aries Kurniawan<sup>6</sup>

Universitas Sriwijaya, Indonesia<sup>1-6</sup>

Email Korespondensi: [ismne1711@gmail.com](mailto:ismne1711@gmail.com), [muliadanda@gmail.com](mailto:muliadanda@gmail.com), [ariniudet08@gmail.com](mailto:ariniudet08@gmail.com), [vieronica.varbi@gmail.com](mailto:vieronica.varbi@gmail.com), [istiqoma@fisip.unsri.ac.id](mailto:istiqoma@fisip.unsri.ac.id), [kurniawandeniaries@gmail.com](mailto:kurniawandeniaries@gmail.com)

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 13 Mei 2026

### ABSTRACT

*This study aims to examine the Spiral of Silence phenomenon in the context of social media in Indonesia, particularly regarding the fear of expressing opinions experienced by individuals in digital spaces. Freedom of expression in Indonesia faces new challenges in the form of digital threats such as doxing, buzzer attacks, and regulations such as the Electronic Information and Transactions Law (ITE Law), which often create a chilling effect for social media users. The Spiral of Silence theory proposed by Elisabeth Noelle-Neumann explains how individuals who feel their opinions differ from the majority tend to choose silence to avoid social isolation. This study uses a literature review method by analyzing various relevant studies. The findings indicate that the spiral of silence phenomenon is evident in Indonesian social media, reinforced by factors such as fear of doxing, buzzer threats, and the potential application of the ITE Law. However, these fears do not always directly influence individuals' willingness to express opinions. On the other hand, collective movements such as academic community petitions show that the spiral of silence can be broken when individuals unite and feel supported by their group. This study concludes that strengthening digital literacy, regulatory reform, and more comprehensive legal protection are needed to guarantee freedom of expression in Indonesia's digital space.*

**Keywords:** *Spiral of Silence, Social Media, Doxing, Buzzer, ITE Law, Freedom of Expression*

### ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena Spiral of Silence (spiral keheningan) dalam konteks media sosial di Indonesia, khususnya berkaitan dengan ketakutan berpendapat yang dialami oleh individu di ruang digital. Kebebasan berekspresi di Indonesia menghadapi tantangan baru berupa ancaman digital seperti doxing, serangan buzzer, dan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang seringkali menimbulkan efek pembungkaman (chilling effect) bagi pengguna media sosial. Teori Spiral of Silence yang dikemukakan oleh Elisabeth Noelle-Neumann menjelaskan bagaimana individu yang merasa pendapatnya berbeda dari opini mayoritas cenderung memilih diam untuk menghindari isolasi sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan menganalisis berbagai penelitian yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa fenomena spiral of silence terbukti terjadi di media sosial Indonesia, terutama diperkuat oleh faktor-faktor seperti ketakutan akan doxing, ancaman buzzer, dan potensi jeratan UU ITE. Meski demikian, ketakutan-ketakutan tersebut tidak selalu secara langsung*

*memengaruhi keinginan berpendapat individu. Di sisi lain, gerakan kolektif seperti petisi civitas akademika menunjukkan bahwa spiral keheningan dapat diputus ketika individu bersatu dan merasa didukung oleh kelompoknya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan literasi digital, reformasi regulasi, dan perlindungan hukum yang lebih komprehensif untuk menjamin kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia.*

**Kata Kunci:** *Spiral of Silence, Media Sosial, Doxing, Buzzer, UU ITE, Kebebasan Berekspresi.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi komunikasi digital telah mengubah cara masyarakat Indonesia berinteraksi dan mengekspresikan pendapatnya. Media sosial seperti Twitter (kini X), Instagram, dan berbagai platform digital lainnya telah menjadi ruang publik baru tempat individu dapat menyuarakan opini, berdiskusi, hingga mengkritik kebijakan pemerintah. Namun di balik keterbukaan tersebut, terdapat ancaman-ancaman yang membuat sebagian orang memilih untuk diam daripada berbicara (Abdurahman, 2025).

Fenomena diam dalam ruang publik ini bukan sesuatu yang baru. Elisabeth Noelle-Neumann pada tahun 1974 telah memperkenalkan teori Spiral of Silence (Spiral Keheningan) yang menjelaskan bagaimana individu cenderung tidak mengemukakan pendapat ketika merasa pandangan mereka berada dalam posisi minoritas, karena takut akan isolasi sosial (Fazatin, 2021). Teori ini awalnya dikembangkan dalam konteks komunikasi massa dan tatap muka, namun kini semakin relevan untuk dikaji dalam konteks media sosial yang menjadi arena opini publik di era digital.

Di Indonesia, fenomena spiral keheningan ini semakin kompleks karena diperkuat oleh berbagai faktor khusus. Pertama, keberadaan buzzer atau pendongeng yang menyerang siapa saja yang mengemukakan pendapat yang dianggap berlawanan dengan kepentingan tertentu. Kedua, ancaman doxing, yaitu praktik mengungkapkan informasi pribadi seseorang secara daring tanpa izin dengan tujuan intimidasi, yang telah menjadi alat pembungkaman yang efektif terhadap aktivis dan suara kritis (Armaini dkk., 2025). Ketiga, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang kerap digunakan untuk menjerat orang yang mengekspresikan pendapat di media sosial, menciptakan rasa takut tersendiri bagi para pengguna internet (Abdurahman, 2025).

Namun di sisi lain, fenomena spiral keheningan ini tidak selalu berhasil membungkam seluruh lapisan masyarakat. Pada awal tahun 2024, gelombang petisi dari civitas akademika berbagai universitas di Indonesia menjadi bukti bahwa spiral keheningan dapat diputus. Para akademisi dari puluhan kampus secara kolektif menyuarakan keprihatinan mereka terhadap kondisi demokrasi Indonesia menjelang Pemilu 2024, menunjukkan bahwa ketika individu bersatu dalam kelompok, mereka memiliki keberanian untuk bersuara meski pendapat mereka termasuk dalam kategori minoritas (Purnama & Hernawan, 2025).

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena Spiral of Silence dalam konteks media sosial Indonesia dengan

---

mempertimbangkan faktor-faktor khas Indonesia seperti ancaman doxing, buzzer, dan UU ITE. Penelitian ini juga akan menganalisis bagaimana fenomena tersebut memengaruhi kebebasan berekspresi dan bagaimana spiral keheningan dapat diputus melalui gerakan kolektif.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (literature review) yang bersifat deskriptif-analitis. Studi literatur dipilih karena metode ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji dan mensintesis berbagai penelitian yang sudah ada secara sistematis untuk membangun pemahaman yang komprehensif tentang fenomena yang diteliti (Fazatin, 2021). Sumber data dalam penelitian ini adalah artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik Spiral of Silence, media sosial, doxing, buzzer, UU ITE, dan kebebasan berekspresi di Indonesia. Pencarian sumber dilakukan melalui berbagai basis data jurnal ilmiah nasional dan internasional. Kriteria pemilihan sumber meliputi relevansi topik, tahun terbit (diutamakan 2021-2025), dan kredibilitas jurnal.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, pengumpulan dan seleksi sumber literatur yang relevan. Kedua, identifikasi tema-tema utama yang muncul dari berbagai sumber tersebut. Ketiga, sintesis dan interpretasi temuan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Proses analisis dilakukan secara iteratif untuk memastikan kedalaman pemahaman dan koherensi argumen.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Spiral of Silence di Media Sosial Indonesia*

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, fenomena Spiral of Silence terbukti terjadi di media sosial Indonesia, meskipun dengan karakteristik yang berbeda dari konteks media massa konvensional. Penelitian Abdurahman (2025) yang menguji teori ini pada setting Twitter dengan fokus isu kebijakan COVID-19 menemukan adanya gejala Spiral of Silence, terutama pada variabel terpaan Twitter terhadap kesesuaian iklim opini.

Temuan penting dari penelitian tersebut adalah bahwa terpaan informasi di Twitter berpengaruh terhadap kesesuaian iklim opini pada isu-isu tertentu yang dekat dengan kehidupan publik, seperti isu larangan mudik yang merupakan tradisi budaya tahunan Indonesia. Semakin sering seseorang mendapatkan informasi tentang isu tersebut di Twitter, semakin besar kemungkinan opini mereka menyesuaikan diri dengan opini yang dominan di platform tersebut (Abdurahman, 2025).

Hal ini selaras dengan argumen Fazatin (2021) yang menyatakan bahwa dalam konteks new media atau media baru, terpaan media merupakan aspek penting dalam terbentuknya efek bungkam pada diri seseorang. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga membentuk persepsi tentang mana opini yang dominan dan mana yang minoritas, sehingga pada akhirnya memengaruhi keputusan individu untuk berbicara atau diam.

---

Namun perlu dicatat bahwa Spiral of Silence tidak terjadi pada semua variabel yang diteliti. Abdurahman (2025) menemukan bahwa ketakutan akan isolasi, UU ITE, buzzer, dan doxing tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap keinginan berpendapat. Temuan ini mengindikasikan bahwa mekanisme yang mendorong seseorang untuk diam atau berbicara di media sosial lebih kompleks dari sekadar ketakutan akan ancaman eksternal.

### *Peran Doxing dalam Menciptakan Chilling Effect*

Meskipun doxing tidak terbukti secara langsung memengaruhi keinginan berpendapat dalam penelitian kuantitatif, bukan berarti ancaman doxing tidak memiliki efek pembungkaman. Armaini dkk. (2025) menunjukkan bahwa doxing telah menciptakan chilling effect yang serius bagi suara kritis di Indonesia. Pola serangan doxing yang menargetkan aktivis dan jurnalis menunjukkan bahwa ancaman ini nyata dan memiliki dampak yang signifikan terhadap kebebasan berekspresi.

Dampak doxing bersifat multi-aspek: pelanggaran langsung terhadap hak atas perlindungan diri pribadi, penciptaan trauma psikologis dan paranoid, hingga ancaman nyata terhadap keselamatan fisik korban. Ketika seorang aktivis atau jurnalis menjadi korban doxing, tidak hanya korban tersebut yang merasakan dampaknya, tetapi juga orang-orang di sekitar mereka yang menyaksikan kejadian tersebut. Efek ini mirip dengan apa yang digambarkan Noelle-Neumann tentang bagaimana ancaman isolasi tidak hanya memengaruhi individu secara langsung, tetapi juga menciptakan iklim ketakutan yang lebih luas (Armaini dkk., 2025).

Dari perspektif hukum, regulasi yang ada belum cukup efektif dalam melindungi korban doxing. UU ITE dan UU PDP memang menyediakan landasan hukum, tetapi tidak secara spesifik mendefinisikan doxing sebagai tindak pidana siber tersendiri. Hal ini menyebabkan penegakan hukum menjadi tidak konsisten dan efek jera bagi pelaku menjadi lemah. Kondisi ini pada akhirnya memperburuk iklim ketakutan yang sudah ada dan semakin mendorong orang untuk memilih diam (Armaini dkk., 2025).

### *Buzzer, UU ITE, dan Dinamika Spiral Keheningan*

Selain doxing, ancaman buzzer dan UU ITE juga menjadi faktor yang memperkuat fenomena Spiral of Silence di Indonesia. Abdurahman (2025) menemukan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara ketidaksetujuan terhadap isu-isu tertentu dengan ketakutan akan buzzer dan doxing. Individu yang tidak setuju dengan kebijakan yang sedang ramai dibahas cenderung merasa lebih takut terhadap ancaman buzzer dan doxing jika mereka mengekspresikan ketidaksetujuan tersebut secara terbuka.

Ketakutan akan UU ITE juga menjadi faktor yang signifikan dalam penelitian tersebut. Responden yang tidak setuju dengan kebijakan tertentu cenderung merasa lebih takut akan konsekuensi hukum berdasarkan UU ITE jika mereka mengekspresikan pendapat tersebut di Twitter. Dalam konteks ini, UU ITE tidak

---

hanya berfungsi sebagai instrumen hukum, tetapi juga sebagai alat pengendali opini publik yang menciptakan iklim ketakutan di media sosial.

Fenomena ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam spiral keheningan di Indonesia. Berbeda dari teori asli Noelle-Neumann yang lebih menekankan pada tekanan sosial dari kelompok mayoritas, di Indonesia tekanan tersebut diperkuat oleh ancaman hukum yang nyata. Hal ini membuat spiral keheningan menjadi lebih kuat dan lebih sulit untuk diputus oleh individu yang bertindak sendiri.

### ***Gender dan Perbedaan Individu dalam Spiral Keheningan***

Aspek lain yang perlu dipertimbangkan dalam mengkaji Spiral of Silence adalah perbedaan individual, termasuk faktor gender. Fazatin (2021) mengkaji teori Spiral of Silence dalam perspektif gender dan menemukan bahwa terdapat perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam hal perilaku pengambilan risiko, kepercayaan, dan privasi dalam menggunakan media sosial.

Secara umum, laki-laki dinilai lebih terbuka dan berani mengambil risiko dalam mengungkapkan pendapat di media sosial dibandingkan perempuan. Perbedaan ini tidak semata-mata bersifat biologis, tetapi lebih dipengaruhi oleh ekspektasi kultural dan sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks ancaman doxing misalnya, perempuan seringkali menghadapi risiko yang lebih besar karena doxing yang menargetkan perempuan seringkali disertai dengan ancaman berbasis gender (Fazatin, 2021).

Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan teori Spiral of Silence di Indonesia perlu mempertimbangkan konteks lokal yang khas, termasuk norma-norma gender yang berlaku. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital juga perlu memberikan perhatian khusus pada kelompok yang lebih rentan, termasuk perempuan dan kelompok minoritas (Fazatin, 2021).

### ***Memutus Spiral Keheningan: Pelajaran dari Petisi Civitas Akademika***

Di tengah berbagai ancaman yang mendorong spiral keheningan, gerakan petisi civitas akademika pada tahun 2024 memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana spiral tersebut dapat diputus. Purnama dan Hernawan (2025) menganalisis gerakan ini dan menemukan bahwa kolektivitas menjadi kunci dalam memutus spiral keheningan.

Ketika Universitas Gadjah Mada mengeluarkan petisi pertama pada 31 Januari 2024, hal tersebut membuka jalan bagi universitas-universitas lain untuk bergabung. Fenomena ini sejalan dengan argumen Noelle-Neumann bahwa individu yang merasa didukung oleh kelompoknya akan lebih berani untuk mengekspresikan pendapat mereka. Dengan bergabungnya hampir 30 universitas, suara yang awalnya mungkin terasa seperti pendapat minoritas berubah menjadi gerakan yang tidak bisa diabaikan (Purnama & Hernawan, 2025).

Gerakan ini juga menunjukkan peran media dalam memutus spiral keheningan. Liputan media terhadap petisi-petisi tersebut membantu menyebarkan informasi bahwa ada banyak orang yang berbagi keprihatinan yang

---

sama, sehingga mendorong lebih banyak pihak untuk bergabung. Hal ini sesuai dengan teori Noelle-Neumann yang menekankan pentingnya persepsi tentang iklim opini dalam menentukan apakah seseorang akan berbicara atau diam (Purnama & Hernawan, 2025).

Pelajaran dari gerakan petisi ini relevan untuk upaya penguatan kebebasan berekspresi di Indonesia secara lebih luas. Ketika individu merasa sendirian dan terisolasi, mereka cenderung memilih diam. Namun ketika mereka menyadari bahwa ada banyak orang yang berbagi pandangan yang sama, keberanian untuk bersuara dapat muncul. Oleh karena itu, membangun ruang-ruang aman dan komunitas yang mendukung kebebasan berekspresi menjadi sangat penting.

### ***Implikasi terhadap Kebijakan dan Perlindungan Kebebasan Berekspresi***

Temuan-temuan dari berbagai penelitian yang dikaji dalam studi literatur ini memiliki implikasi penting bagi kebijakan perlindungan kebebasan berekspresi di Indonesia. Pertama, diperlukan reformasi regulasi yang lebih komprehensif, terutama terkait doxing. UU ITE dan UU PDP perlu disinkronisasi dan diperkuat dengan merumuskan doxing secara spesifik sebagai tindak pidana siber. Selain itu, mekanisme perlindungan dan pemulihan bagi korban doxing perlu diperjelas, termasuk rehabilitasi psikologis dan kompensasi atas kerugian yang diderita (Armaini dkk., 2025).

Kedua, peningkatan literasi digital bagi masyarakat menjadi sangat penting. Pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak digital, cara melindungi diri dari doxing, dan mekanisme pelaporan jika menjadi korban dapat membantu mengurangi rasa takut dalam berekspresi. Literasi digital yang baik juga dapat membantu masyarakat dalam memilah informasi yang benar dari hoaks yang disebar oleh buzzer (Armaini dkk., 2025).

Ketiga, penguatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kejahatan siber, termasuk doxing, sangat diperlukan. Aparat perlu dibekali dengan pemahaman yang komprehensif tentang berbagai modus kejahatan digital dan cara pembuktiannya. Pembentukan unit khusus yang menangani kasus-kasus yang menasar aktivis, jurnalis, dan pembela hak asasi manusia juga dapat memperkuat perlindungan bagi kelompok-kelompok yang paling rentan (Armaini dkk., 2025).

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa fenomena Spiral of Silence terbukti terjadi di media sosial Indonesia, meskipun dengan karakteristik yang berbeda dari konteks media massa konvensional yang menjadi latar belakang teori aslinya. Di Indonesia, spiral keheningan diperkuat oleh faktor-faktor khas seperti ancaman doxing, serangan buzzer, dan potensi jeratan UU ITE yang menciptakan iklim ketakutan di ruang digital. Meskipun demikian, ketakutan-ketakutan tersebut tidak selalu secara langsung memengaruhi keinginan individu untuk berpendapat. Mekanisme yang mendorong seseorang untuk diam atau berbicara lebih kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kedekatan isu dengan kehidupan

sehari-hari, nilai-nilai moral yang terkandung dalam isu tersebut, dan tingkat dukungan sosial yang dirasakan oleh individu.

Pelajaran penting dari gerakan petisi civitas akademika tahun 2024 adalah bahwa spiral keheningan dapat diputus melalui gerakan kolektif. Ketika individu-individu yang berbagi keprihatinan yang sama bersatu, mereka dapat menemukan keberanian untuk bersuara meski menghadapi tekanan sosial dan ancaman eksternal. Untuk ke depannya, diperlukan upaya-upaya komprehensif yang melibatkan berbagai pihak: pemerintah perlu mereformasi regulasi agar lebih melindungi kebebasan berekspresi dan hak privasi; aparat penegak hukum perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam menangani kejahatan siber; masyarakat perlu meningkatkan literasi digitalnya; dan perlu dibangun lebih banyak ruang aman yang mendukung kebebasan berekspresi di Indonesia. Hanya dengan upaya bersama inilah fenomena Spiral of Silence di era digital dapat diatasi dan kebebasan berekspresi dapat terwujud secara substantif.

## DAFTAR RUJUKAN

- Abdurahman, A. I. (2025). Ketakutan Akan Isolasi, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Buzzer Dan Doxing. Mana Yang Berpengaruh Terhadap Keinginan Berpendapat? *Dialektika Komunika: Jurnal Kajian Komunikasi dan Pembangunan Daerah*. EISSN: 27164012.
- Armaini, F. S., Oktaviani, W., Ardianti, C. A., Faradila, S. A., & Ayustiatmojo, D. (2025). Di Balik Layar Media Sosial: Bagaimana Doxing Menjadi Alat Membungkam Aktivistis, Membungkam Kritis, dan Merusak Kebebasan Digital. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, 2(5), 242–251. <https://doi.org/10.69714/x4n3r290>
- Castells, M. (2015). *Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age*. Polity Press.
- Eriyanto, E. (2017). Teori Spiral Kesunyian dan Negara Transisi Demokrasi: Sebuah Pengujian di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 1(1), 13–22. <https://doi.org/10.7454/jki.v1i1.7808>
- Fazatin, N. (2021). Teori Spiral of Silence dalam Kajian Gender di New Media. *SELASAR KPI: Referensi Media Komunikasi dan Dakwah*, 1(1), 45–54.
- Gearhart, S., & Zhang, W. (2014). Gay Bullying and Online Opinion Expression: Testing Spiral of Silence in the Social Media Environment. *Social Science Computer Review*, 32(1), 18–36. <https://doi.org/10.1177/0894439313504261>
- Kholifah, N., Busri, H., & Wahyuni, S. (2025). The Phenomenon of Silencing Activists in The Novel Laut Bercecerita and Digital Silencing in Indonesia: An Analysis of Gramsci's Hegemony. *KEMBARA: Jurnal Keilmuan Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 11(1), 405–422. <https://doi.org/10.22219/kembara.v11i1.39572>
- Kusuma, R., & Pratama, A. (2024). Evolusi Praktik Pembungkaman dalam Era Digital. *Jurnal Komunikasi dan Media*, 15(2), 78–92.

- 
- Liu, X., & Fahmy, S. (2011). Exploring the Spiral of Silence in the Virtual World: Individuals' Willingness to Express Personal Opinions in Online Versus Offline Settings. *Journal of Media and Communication Studies*, 3(2), 45–57.
- Noelle-Neumann, E. (1984). *The Spiral of Silence: Public Opinion, Our Social Skin*. University of Chicago Press.
- Noviana, D., & Wijaya, H. (2023). Pembungkaman Digital di Indonesia: Pola dan Implikasinya. *Jurnal Studi Media dan Komunikasi*, 10(3), 101–115.
- Purnama, A., & Hernawan, W. (2025). Analisis Gerakan Petisi Civitas Akademika dalam Teori Spiral of Silence. *Journal Media Public Relations*, 5(1), 129–137.
- Rahmawati, A. (2023). Pembungkaman Digital: Kontrol Sosial dalam Era Informasi. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 12(1), 45–60.
- Scheufele, D. A., & Moy, P. (2000). Twenty-Five Years of the Spiral of Silence: A Conceptual Review and Empirical Outlook. *International Journal of Public Opinion Research*, 12(1), 3–28.
- Wicaksono, B., & Sutrisno, H. (2024). Kontribusi Penelitian terhadap Kajian Pembungkaman. *Jurnal Penelitian Sosial dan Humaniora*, 13(2), 15–29.
- Wijaya, H., & Putri, S. (2024). Trauma Kolektif dalam Novel Laut Bercerita. *Jurnal Sastra dan Budaya*, 8(1), 23–35.